



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNIT KERJA : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD KILANG
2. Jabatan : KEPALA DINAS PENGENDLAIAN PENDUDUKU, KB, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3. NHK : 216335

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.595.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 690 m2/222 m2 di POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 266 m2/154 m2 di POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 645.000.000
3. Tanah Seluas 69 m2 di POLEWALI MANDAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 691.420.000

1. MOBIL, SUZUKI SPLASH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER G.M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 573.420.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 22.150.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 479.000.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. 335.000.000**Sub Total** Rp. 3.122.570.000**III. HUTANG** Rp. 140.207.500**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.982.362.500



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.